

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 12, Vol. I. Juni 2016

Problematika
Menerangi
Papua dengan
Program
Indonesia
Terang

p. 02

Daging Sapi:
Selamanya
Impor atau
Swasembada

p. 06

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



9 772502 868006

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Editor

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.

DAFTAR ISI

Update APBN.....	p.01
Problematika Menerangi Papua dengan Program Indonesia Terang.....	p.02
Daging Sapi: Selamanya Impor atau Swasembada.....	p.06

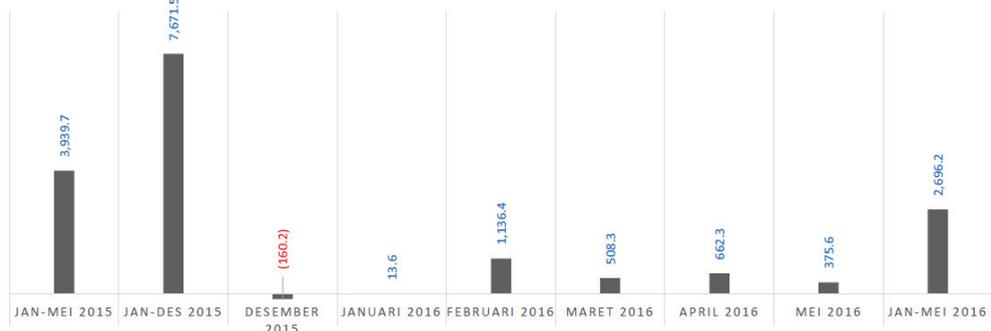
Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

UPDATE APBN

Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2016 mengalami surplus senilai 375,6 juta USD dipicu oleh surplus sektor non migas sebesar 1.086,3 juta USD, namun sektor migas defisit 710,7 juta USD. Dari sisi volume perdagangan, pada Mei 2016 neraca volume perdagangan Indonesia mengalami surplus 26.953,8 ribu ton. Hal tersebut didorong oleh surplusnya neraca volume perdagangan non migas 27.591,2 ribu ton, sebaliknya sektor migas defisit 637,4 ribu ton.

Neraca perdagangan Januari-Mei tahun 2016, masih menunjukkan angka di bawah tahun 2015, yaitu sebesar 2.696,2 juta USD, sedangkan di tahun 2015, hingga bulan Mei 2015 sebesar 3.939,7 juta USD.

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA
TAHUN 2015-MEI 2016



Sumber: BPS, 2016, diolah

Problematika Menerangi Papua dengan Program Indonesia Terang

Adhi Prasetyo S. W*)

Listrik adalah gerbang menuju Indonesia maju. Dengan listrik masyarakat Indonesia di daerah terpencil akan menikmati akses atas penerangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja yang luas, tingkat keamanan yang lebih terjamin, hingga kehidupan sosial yang lebih bermartabat serta dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, yang salah satunya adalah infrastruktur ketenagalistrikan.

Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Dari 34 Provinsi di Indonesia, setidaknya masih ada enam provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana terdapat 12.659 desa tertinggal yang belum dialiri listrik selama 24 jam penuh, dengan 2.519 desa dari jumlah tersebut masih gelap sama sekali tanpa fasilitas listrik. Untuk menjawab permasalahan tersebut Pemerintah melalui Kementerian ESDM meluncurkan Program "Indonesia Terang" dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional dari 85 persen pada tahun 2015 menjadi 97 persen di tahun 2019. Program Indonesia Terang juga menjadi bagian dari target pemerintah menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara merata melalui pembangunan pembangkit 35.000 megawatt (MW). Program ini diharapkan dapat menjangkau 10.300 desa hingga akhir tahun 2019, dengan fokus pada kawasan Indonesia Timur karena 67 persen dari desa yang belum teraliri listrik berada di kawasan ini.

Secara keseluruhan Program Indonesia Terang akan memerlukan investasi sekitar Rp 100 triliun, dengan harapan 80 persen diantaranya akan dipenuhi oleh investasi korporasi, dan APBN akan menyangga 20 persen.

*) Dewan Redaksi Buletin APBN

Untuk itu pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE) menjadi semakin penting dan mendesak. Program Indonesia Terang akan dimulai dari enam provinsi paling timur Indonesia. Kesulitan akses yang menjadi dasar keenam provinsi tersebut untuk digarap terlebih dahulu. Dari timur, program ini akan digerakkan secara cepat ke bagian barat Indonesia. Keenamnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.

Kondisi Saat Ini & Kebijakannya

Rasio elektrifikasi wilayah Papua dan Papua Barat (P2B) sampai dengan saat ini masih sangat jauh berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Untuk itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang mengejar target peningkatan rasio elektrifikasi bagi Papua dan Papua Barat hingga 90,25 persen pada tahun 2020 bertepatan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX yang akan diselenggarakan di Papua. Dimana rencana pembangunannya sudah tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan masuk dalam Program 35 ribu Mega Watt (MW) yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo. Pulau Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2014 sekitar 491 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sekitar 275 MW, *Independent Power Producer* (IPP) sekitar 21 MW dan Izin Operasi (IO) Non BBM sekitar 195 MW. Total panjang jaringan transmisi tenaga listrik sekitar 115 kilo meter sirkuit (kms). Sementara itu panjang jaringan distribusi tenaga listrik sekitar 8.086 kms dan gardu distribusi berjumlah 2.707 unit dengan total kapasitas 345 Mega Volt Ampere (MVA). Jumlah pelanggan listrik yang terdaftar di PLN untuk wilayah Papua dan Papua Barat tercatat ada 500.969 pelanggan, dimana Biaya Pokok Produksi yang dikeluarkan PLN Rp2.644/kWH dan harga jual Rp1.156/kWH. Jika melihat tabel 1, rasio elektrifikasi pada wilayah Papua dan Papua Barat, khusus Provinsi Papua dari 29 Kabupaten masih terdapat 15 Kabupaten dan 3 Kabupaten di Papua

Tabel 1. Rasio Elektrifikasi P2B

No	Provinsi/Kabupaten	RE TOTAL (%)
Provinsi Papua		45.93
1	Kota Jayapura	100.00
2	Jayapura	100.00
3	Jayawijaya	26.14
4	Mimika	83.71
5	Keerom	100.00
6	Sarmi	78.34
7	Pegunungan Bintang	7.65
8	Tolikara	2.60
9	Yakuhimo	6.55
10	Puncak Jaya	5.58
11	Lanny Jaya	0.05
12	Mamberamo Raya	25.80
13	Mamberamo Tengah	0.84
14	Puncak	0.08
15	Nduga	0.20
16	Intan Jaya	9.49
17	Yalimo	7.17
18	Biak Numfor	100.00
19	Kepulauan Yapen	75.36
20	Waropen	100.00
21	Supiori	45.17
22	Merauke	97.82
23	Bouven Digoel	69.24
24	Mappi	19.22
25	Asmat	15.55
26	Paniai	1.81
27	Dogiyai	3.98
28	Deiyai	1.63
29	Nabire	96.28
No	Provinsi/Kabupaten	RE TOTAL (%)
Papua Barat		82.70
1	Manokwari	91.03
2	Teluk Bintuni	50.73
3	Teluk Wondama	19.10
4	Kota Sorong	100.00
5	Sorong	100.00
6	Fakfak	74.20
7	Kaimana	49.07
8	Raja Ampat	81.27
9	Tambrauw	19.98
10	Maybrat	3.00
11	Sorong Selatan	71.63

Sumber : PLN

Barat yang rasio elektrifikasinya di bawah 25 persen, ini dapat terlihat pada rasio elektrifikasi pada tabel 1.

Adapun yang menjadi perhatian PLN untuk peningkatan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat (P2B) yakni: 1) mengaliri listrik di 14 Ibu Kota kabupaten yang belum tersedia listrik, sampai dengan tahun 2017; 2) pengoperasian listrik 24 jam untuk seluruh desa untuk tahun 2017; 3) desa teraliri listrik diharapkan bisa mencapai 80,8 persen; dan 4) pulau terluar dalam tiga tahun ke depan sudah teraliri listrik.

Sebagai tindak lanjut dari program Indonesia Terang, khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat, PLN telah menyusun peta program kelistrikan P2B selama tahun 2016-2020. Dimana diharapkan hingga tahun 2020 telah terbangun Pembangkit Listrik 737 MW yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), *Mobile Power Plant* (MPP). Khusus tahun 2016 ada 4 kabupaten yang menjadi prioritas untuk dialiri listrik oleh PLN yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Deiyai.

Potensi dan Kendala

Dengan potensi sumber daya energi seperti minyak bumi, gas bumi, panas bumi, batubara, tenaga air, tenaga matahari dan energi terbarukan di Papua luar biasa melimpah, namun sangat disayangkan baru sebagian kecil energi yang dimanfaatkan secara optimal. Baru potensi minyak bumi dan gas bumi (migas) yang saat ini menjadi andalan utama sebagai sumber daya energi baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor.

Meskipun potensi sumber daya energi di Papua dan Papua Barat melimpah untuk menciptakan listrik murah, ternyata terdapat beberapa kendala dalam pengembangan tersebut sehingga banyak potensi yang belum termanfaatkan. Beberapa kendala tersebut adalah: **pertama, rumitnya perizinan merupakan masalah klasik di Indonesia**, rendahnya investasi pembangunan yang masuk di daerah kerap terhambat karena banyaknya regulasi dan panjangnya rantai birokrasi yang harus dipenuhi melibatkan banyak

infrastruktur. Permasalahan sulitnya perizinan dan terhambatnya koordinasi lintas sektoral serta terpecahnya pembangunan infrastruktur di berbagai kementerian adalah alasan yang mendasari dibutuhkannya badan khusus tersebut. Pokja Kadin Konstruksi dan Infrastruktur (2016), mengusulkan badan khusus ini berfungsi untuk merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berfokus kepada fasilitasi insentif bagi akselerasi pembangunan infrastruktur. Badan ini diharapkan dapat menjadi seperti Badan Ekonomi Kreatif, sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang fokus mengurus urusan ekonomi kreatif dimana posisinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kadin mengusulkan dibentuk (Berawi, 2016) Badan Pengembangan Konstruksi dan Infrastruktur (BPKI) memiliki tugas dan wewenang antara lain: a) Registrasi, penilaian dan penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha; b) Penguatan kapasitas dan kompetensi kepada semua pemangku kepentingan Jasa dan Konstruksi; c) Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan fasilitasi dan penyediaan insentif di bidang konstruksi dan infrastruktur; dan d) Pusat Informasi dan Kerjasama para pihak di bidang konstruksi dan infrastruktur.

Kedua, Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi dan pendekatan sosial kultural kepada masyarakat khususnya kepala suku mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik dan lahan yang digunakan untuk pembangunan jaringan listrik serta menjelaskan arti pentingnya keberadaan listrik bagi masyarakat. Pelatihan ketrampilan juga diperlukan bagi masyarakat yang tanahnya dilewati atau berada di sekitar lokasi proyek pembangunan jaringan listrik agar mereka mampu ikut bergabung dalam proyek tersebut tidak hanya sekedar menjadi penonton dan disparitas ekonomi dapat berkurang yang bisa meminimalisir gangguan keamanan.

Ketiga, Pemerintah bisa

menggendong atau mewajibkan operator seluler agar sekian persen dari jumlah tower Base Transceiver Station (BTS) diprioritaskan dibangun di daerah Indonesia Timur sehingga kualitas sinyal dapat merata tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

Keempat, pengembangan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan bisa menjadi solusi, dengan membangun PLTMH dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kondisi geografis Papua yang mayoritas pegunungan yang tentunya dikelilingi sungai sangat mendukung untuk mendukung dibangun PLTA/PLTM. Papua memiliki sekitar 52 sungai dengan potensi maksimal sebesar 22.131,6 MW atau energi sebesar 135.036,8 GWH. Dari sekian banyak sungai tersebut hanya sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, itu pun untuk pembangkit listrik skala kecil seperti PLTM. Sungai tersebut juga mampu dimanfaatkan sebagai alat transportasi mengirim barang. PLTS bisa diterapkan untuk daerah terpencil yang sulit terjangkau dan tidak dilewati sungai, posisi Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa tentunya tidak akan kekurangan sinar matahari.

Daftar Pustaka

Energi Today. (2013, Januari 1). Diambil kembali dari Energi Today: <http://energitoday.com/2013/01/papua-perawan-eksotik-dengan-segudang-potensi-energi/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016, April 22). Diambil kembali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: <http://esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/8385-program-indonesia-terang-harus-jadi-prioritas-nasional.html>

PT PLN (Persero). (2016, April 21). Diambil kembali dari PT PLN (Persero): <http://www.pln.co.id/blog/melalui-program-indonesia-terang-esdm-dan-pln-pasok-listrik-indonesia-timur/>

Berawi, Mohammed Ali. (2016). Diskusi Pembangunan Infrastruktur Berdimensi Kewilayahan Untuk Atasi Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah.

Daging Sapi: Selamanya Impor atau Swasembada

Dahiri¹⁾

Abstrak

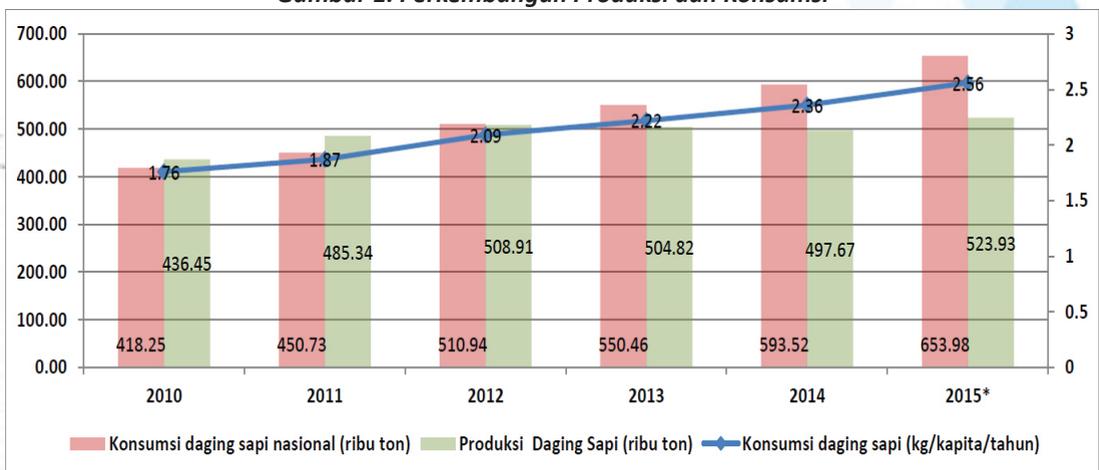
Konsumsi daging sapi nasional terus meningkat setiap tahun. Peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi daging sapi. Akibatnya, Pemerintah cenderung mengimpor daging sapi untuk memenuhi kekurangan produksi. Adapun impor tersebut, bukanlah impor sapi bibit melainkan sapi bakalan. Namun, upaya ini bertentangan dengan salah satu inti Nawa Cita yaitu kedaulatan pangan, khususnya swasembada daging sapi. Jika Pemerintah terus cenderung mengimpor daging sapi atau sapi bakalan, maka Indonesia akan terus menjadi net importir dan tidak pernah mewujudkan swasembada daging sapi. Oleh karena itu, untuk bisa mewujudkan swasembada daging sapi, Pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan sumber daya manusia peternak sapi, meningkatkan kapasitas usaha peternak pembibitan sapi, meningkatkan infrastruktur Inseminasi Buatan (IB) dan tenaga inseminator, memperbaiki sistem distribusi, modernisasi rumah potong hewan (RPH), dan mengoptimalkan lahan-lahan tidur untuk usaha peternakan sapi baik pembibitan maupun penggemukan yang terintegrasi.

Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pemenuhan gizi masyarakat. Permintaan daging sapi setiap tahun selalu meningkat karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, pengetahuan masyarakat terhadap keseimbangan dalam pola makanan dan pentingnya akan protein hewani memberikan andil terhadap peningkatan konsumsi daging sapi. Namun, peningkatan permintaan tersebut

tidak diimbangi dengan peningkatan suplai atau produksi daging sapi.

Kondisi ini menyebabkan kelebihan permintaan yang pada akhirnya berdampak pada mahalnya daging sapi di pasar. Hal ini terjadi hampir setiap tahun. Mahalnya daging sapi tersebut, akhirnya berdampak terhadap perilaku masyarakat yang cenderung mengurangi konsumsi daging sapi. Padahal, konsumsi daging masyarakat Indonesia jauh dari ideal dan jauh dari beberapa negara, seperti

Gambar 1. Perkembangan Produksi dan Konsumsi



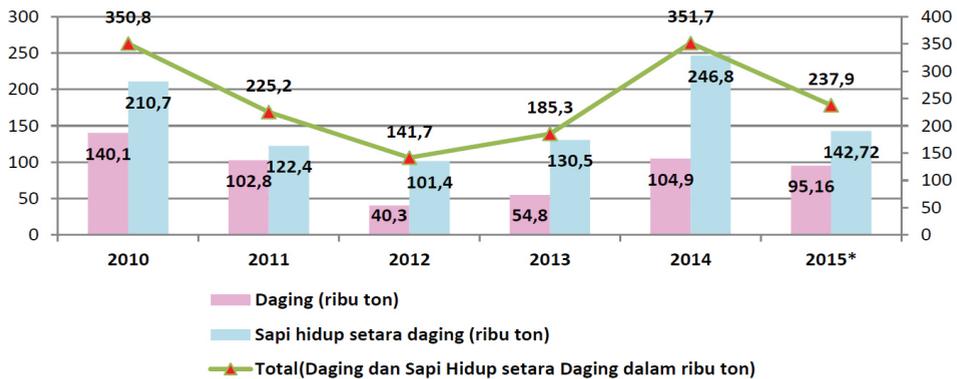
Sumber: BPS, 2015, diolah.

*Angka kesepakatan dalam rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian bulan Agustus 2015 kecuali produksi.

1) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dahiridai@gmail.com

2) Faizul Ishom, diambil dari <http://www.antaraneews.com/berita/527724/konsumsi-daging-sapi-orang-indonesia-masih-rendah>

Gambar 2. Perkembangan Impor Daging dan Sapi Hidup (ribu ton)



Sumber: BPS, 2015, diolah.

*Angka kesepakatan dalam rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian bulan Agustus 2015 kecuali produksi.

Singapura dan Malaysia konsumsi daging sapi sebanyak 15 kg/kapita/tahun². Untuk menyelesaikan permasalahan ini, upaya dan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator menjadi penting. Salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan solusi terhadap kurangnya suplai tersebut yaitu impor daging sapi.

Impor daging sapi cenderung menjadi agenda tahunan Pemerintah sebagai upaya memenuhi permintaan daging sapi yang setiap tahunnya meningkat.

Impor daging sapi terendah terjadi di tahun 2012 dibandingkan dengan tahun lainnya. Rendahnya impor di tahun 2012 karena volume produksi hampir bisa mengimbangi volume konsumsi nasional. Namun, impor setelah tahun 2012 terus mengalami peningkatan hingga 2014 dan sedikit turun di tahun 2015. Penurunan impor di tahun 2015 diduga karena melemahnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari perlambatan ekonomi.

Pilihan kebijakan impor oleh Pemerintah ini lebih disebabkan oleh kondisi suplai yang tidak mampu mengimbangi atau memenuhi lonjakan permintaan daging sapi dari masyarakat. Kondisi suplai yang tidak memadai tersebut, sebenarnya lebih disebabkan oleh volume produksi daging sapi domestik yang belum maksimal. Produksi yang belum cukup memenuhi permintaan perlu dikaji lebih komprehensif mengingat Indonesia secara demografis masih memungkinkan untuk mengembangkan ternak sapi karena lahan dan pakan masih bisa dimaksimalkan. Kondisi Indonesia saat ini masih memiliki lahan luas yang menganggur dengan luas 72 juta hektar³.

Dengan luas lahan tersebut, Indonesia masih memiliki peluang untuk bisa mewujudkan swasembada daging sapi.

Kendala Swasembada Daging Sapi

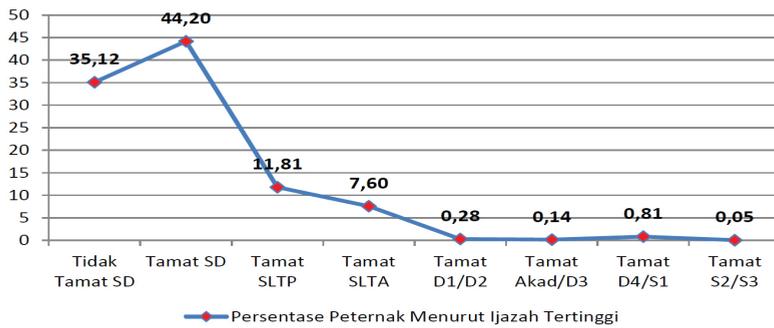
Impor daging sapi selama ini sebenarnya bertentangan dengan salah satu inti Nawa Cita yang dirumuskan oleh Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yaitu kedaulatan pangan. Pemerintah telah menargetkan produksi daging sapi pada tahun 2019 sebesar 755,1 ribu ton. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mewujudkan swasembada daging sapi, yang merupakan salah satu pangan strategis. Untuk bisa mewujudkan swasembada tersebut, Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produksi daging sapi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produksi daging sapi Indonesia masih belum maksimal, antara lain adalah sumber daya manusia untuk peternak masih rendah, budidaya pembibitan sapi yang minim, buruknya distribusi, dan kurangnya pemanfaatan teknologi pada rumah potong hewan (RPH).

Sumber daya manusia untuk peternak masih rendah merupakan salah satu pemicu minimnya produksi daging sapi. Peternak sapi di Indonesia didominasi oleh peternak sapi rakyat yang hanya tamat SD dan tidak tamat SD sebesar 79,32 persen. Bahkan lulusan sarjana agribisnis pertanian masih enggan untuk mengembangkan usaha ternak bahkan cenderung migrasi ke profesi lainnya. Dengan kondisi ini, pemerintah perlu meningkatkan lagi pelatihan bagi peternak sapi potong rakyat ini.

Kapasitas usaha produksi

3) Lulut Pandjaitan, diambil dari <http://www.varia.id/2015/04/03/pemerintah-akan-olah-lahan-tidur-jadi-produktif/>

Gambar 3. Persentase Peternak Menurut Ijazah Tertinggi



Sumber: BPS, diolah.

peternakan juga masih minim, rata-rata hanya 2-3 ekor per rumah tangga usaha peternakan⁴. Masalah lainnya adalah pemberian pakan yang hanya bersumber dari rumput-rumputan, tanpa memperhatikan gizi untuk ternak. Padahal, pemberian pakan yang memperhatikan gizi ternak sangat berkorelasi dengan penambahan bobot sapi yang dihasilkan. Akibat pemberian pakan yang buruk ini, bobot sapi yang dihasilkan peternak sapi rakyat menjadi tidak begitu baik dan maksimal. Capaian penambahan bobot sapi dari peternak sapi rakyat hanya 0,3-0,8 kg/ekor/hari lebih kecil dari usaha peternak skala komersil mencapai 1-1,4 kg/ekor/hari⁵.

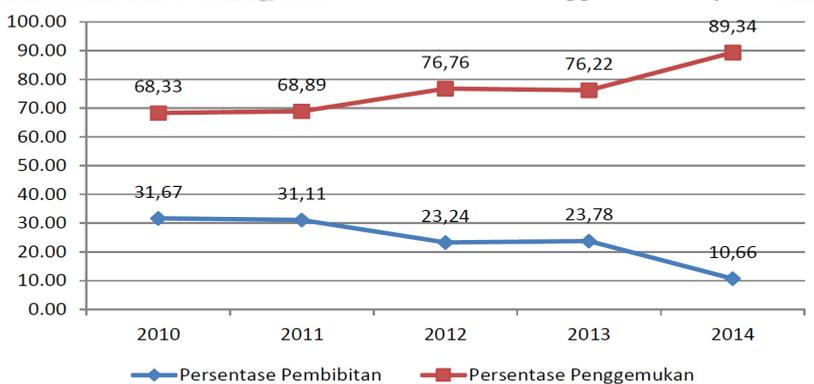
Minimnya usaha pembibitan sapi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kurangnya produksi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi nasional. Kapasitas Usaha pembibitan sapi lebih rendah dari kapasitas usaha penggemukan sapi. Hal ini disebabkan oleh pembibitan sapi memerlukan investasi jangka panjang sedangkan

penggemukan investasi memiliki jangka yang lebih pendek. Kemudian dana yang yang diperlukan dalam usaha pembibitan sapi relatif lebih besar daripada usaha penggemukan sapi. Para pengusaha cenderung memilih usaha penggemukan sapi karena lebih menguntungkan. Selain itu, usaha pembibitan sapi membutuhkan lahan hijau yang luas, sedangkan ruang lahan yang dimaksud sudah sangat minim di Pulau Jawa kecuali di luar Jawa khususnya Indonesia Timur.

Setelah memetakan wilayah Indonesia Timur sebagai basis pembibitan, maka terdapat problem lain yaitu infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang tidak memadai ini berdampak pada biaya transportasi yang cukup tinggi dan mahal. Akibatnya harga bibit sapi akan menjadi mahal. Saat ini usaha pembibitan masih didominasi oleh peternak sapi rakyat. Jelas bibit tidak akan mencukupi untuk permintaan daging sapi karena rata-rata jumlah sapi hanya 2-3 ekor per rumah tangga.

Persentase usaha penggemukan

Gambar 4. Persentase Pembibitan dan Penggemukan Sapi



Sumber: BPS, diolah.

4) ST2013, BPS

5) ST2013, BPS

sapi setiap tahun lebih tinggi dari usaha penggemukan sapi. Padahal, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah menargetkan pengadaan bibit, indukan, dan bakalan sapi sebanyak 31.200 ekor setiap tahunnya. Namun, pemerintah cenderung mengimpor sapi bakalan yang siap dipotong bukan sapi bibit. Kebijakan ini dalam jangka pendek bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi, namun dalam jangka panjang berdampak buruk untuk swasembada daging sapi. Untuk bisa menopang upaya pembibitan sapi yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur inseminasi buatan (IB) dan tenaga inseminator menjadi penting. IB bisa membantu dalam mempercepat menghasilkan sapi bibit yang berkualitas. Kondisi infrastruktur IB saat ini masih banyak menghadapi kendala. Pertama, peternak usaha pembibitan didominasi peternak sapi rakyat yang masih belum familiar dengan IB. Kedua, tenaga inseminator, semen sapi unggul, dan infrastruktur yang masih minim. Ketiga, konversi lahan ke industri atau perumahan semakin meningkat sehingga mengurangi lahan penggemalaan. Keempat, pihak swasta atau investor masih belum tertarik pada usaha pembibitan karena keuntungan relatif lebih kecil dan permutaran arus modal lebih lama dari usaha penggemukan sapi.

Jika hal ini tidak menjadi perhatian Pemerintah, maka populasi sapi Indonesia di masa yang akan datang bisa terus mengalami penurunan. Dampak penurunan populasi sapi, Indonesia akan terus menjadi *net importir* dan tidak pernah mewujudkan swasembada sapi. Untuk mendorong kapasitas pembibitan, Pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik bagi pelaku usaha pembibitan khususnya peternak komersial. Insentif tersebut dapat berupa kredit permodalan dengan suku bunga yang kompetitif, sedangkan untuk peternak sapi rakyat, insentif tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan sapi hidup. Pemberian bantuan sapi hidup tersebut lebih didasarkan pada peternak sapi rakyat yang tidak terlalu berpengaruh dengan insentif kredit permodalan. Selain permodalan, Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada peternak pembibitan akan pentingnya IB untuk mengoptimalkan pendapatan peternak sapi rakyat. Pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur IB dengan

satu provinsi minimal satu. Pemerintah harus mengintegrasikan daerah usaha pembibitan dan penggemukan supaya meminimalisir biaya transportasi kepada peternak penggemukan sehingga harga jual bisa lebih terkendali dan murah.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah **pemasaran daging sapi yang kurang optimal di Indonesia**. Pemasaran masih menjadi permasalahan tiap tahun. Pemasaran merupakan ujung tombak dari para peternak untuk bisa menjual hasil produknya. Faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya pemasaran tidak lepas dari transportasi untuk pendistribusian barang. Transportasi antar daerah baik antar kabupaten/kota maupun provinsi masih menjadi kendala karena infrastruktur yang belum merata. Hal ini juga menjadi alasan para pedagang untuk bisa mendapatkan margin yang cukup besar dari hasil penjualan. Harga ditingkat produsen/RPH rata-rata sebesar Rp85.889 per kg. Sedangkan harga di tingkat konsumen rata-rata sebesar Rp104.328 per kg⁶. Para pedagang mengambil margin keuntungan yang sangat besar yaitu mencapai 74,37 persen. Artinya, pedaganglah yang paling banyak menikmati keuntungan. Sedangkan harga sapi hidup relatif stabil. Kondisi ini akan mengurangi penawaran sapi oleh peternak. Peternak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan merespon terhadap perubahan selisih harga tersebut, dengan elastisitas jangka pendek -1,11 dan jangka panjang -1,36. Perilaku ini menunjukkan bahwa peternak tidak bersedia jika sebagian besar margin keuntungan hanya diterima oleh pedagang⁷. Lebih lanjut, jika harga daging sapi lokal dibandingkan dengan harga daging sapi impor, maka harga daging sapi impor hanya sebesar Rp61.943 per kg lebih murah dari produsen/RPH domestik. Artinya biaya transportasi impor khususnya dari Australia lebih murah dari transportasi domestik, seperti NTT ke Pulau Jawa. Mahalnya biaya transportasi ini merupakan kendala sangat penting khususnya wilayah Indonesia Timur. Dengan adanya program tol laut, peternak berharap bisa meminimalisir biaya tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengoptimalkan tol laut tersebut.

Kurangnya pemanfaatan teknologi pada rumah potong hewan (RPH) juga menjadi kendala swasembada sapi.

6) bkp.sumbarprov.go.id, perkembangan harga dan pasokan pangan di provinsi sumatera barat.

7) Ilham, Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner

Jika dilihat dari daerah produsen sapi terbesar dan jumlah penduduk terbanyak yaitu Pulau Jawa dari tahun 2010-2015, rata-rata rasio produksi daging sapi dan populasi sapi masing-masing 59,26 persen dan 46,24 persen, maka harga yang mahal diindikasikan bukan hanya semata dari transportasi. Karena infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah baik dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa. Menurut hemat penulis, ada indikasi lain, selain transportasi yang menyebabkan mahalnya harga daging sapi di tingkat konsumen. Indikasi tersebut adalah metode pemotongan di rumah pemotongan hewan (RPH) cenderung masih menggunakan alat tradisional sehingga biaya operasional untuk pemotongan menjadi mahal. Pemotongan tradisional dengan jumlah puluhan orang dan peralatan/mesin sederhana hanya mampu menghasilkan satu daging karkas per jam, sedangkan pemotongan modern dengan mesin yang canggih mampu menghasilkan ratusan karkas per jam. Pada saat ini sudah ada rumah potong hewan menggunakan mesin, namun jumlahnya belum begitu banyak. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan rumah potong hewan dengan modernisasi mesin pemotong.

Rekomendasi

Upaya yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi yaitu: **pertama, meningkatkan lagi pelatihan bagi peternak sapi potong** rakyat ini. Pelatihan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas peternak rakyat, agar produksi sapi (baik jumlah maupun penambahan bobot sapi) di level peternak rakyat meningkat. **Kedua, meningkatkan kapasitas usaha peternak pembibitan sapi dengan pemberian insentif.** Insentif bisa berupa pemberian kredit dengan suku bunga kompetitif kepada peternak khususnya peternak komersial. Sedangkan insentif untuk peternak sapi rakyat berupa pemberian sapi bibit, karena peternak sapi rakyat cenderung tidak dipengeruhi oleh perkreditan. **Ketiga, meningkatkan infrastruktur Inseminasi buatan (IB) dan tenaga inseminator.** IB bisa memberikan keuntungan bagi peternak sapi yaitu menghemat biaya operasional karena peternak tidak perlu memelihara sapi pejantan dan efisiensi waktu karena peternak tidak perlu repot lagi untuk mencari sapi pejantan tapi cukup menghubungi tenaga

inseminator. Keuntungan bagi Pemerintah bisa membantu peningkatan produksi sapi potong, karena sapi pejantan bisa dimaksimalkan untuk dipotong. **Keempat, memperbaiki sistem distribusi dengan mengoptimalkan tol laut** yang telah masuk dalam program pembangunan nasional. Dengan tol laut tersebut, diharapkan bisa meminimalisir biaya transportasi sehingga harga daging sapi bisa relatif murah dan stabil. **Kelima, meningkatkan rumah potong hewan dengan modernisasi mesin pemotong.** Modernisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pemotongan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan harga sapi di pasaran. **Keenam, mengoptimalkan lahan-lahan tidur untuk usaha peternakan sapi baik pembibitan maupun penggemukan yang terintegrasi.** Terintegrasi yang dimaksud adalah usaha peternakan pembibitan dan penggemukan satu wilayah sehingga bisa meminimalisir biaya operasional. Bahkan lebih baik lagi jika rumah pemotongan hewan (RPH) juga bisa terintegrasi dengan usaha pembibitan dan penggemukan sapi. Jika upaya-upaya tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah, maka Indonesia akan terus bergantung dengan impor.

Daftar Pustaka

- BPS dan Universitas Lampung. (2015). *Analisis Tematik ST2013 Subsektor Agribisnis Usaha Rumah Tangga Budidaya Sapi dan Target Swasembada*. Jakarta: BPS.
- BKP.Sumbarprov.go.id. (2015). *Pangan Di Provinsi Sumatera Barat Periode Bulan Maret Tahun 2015*. Sumatera Barat: BKP
- Ilham, Nyak. (2001). *Analisis Permintaan dan Penawaran Daging Sapi di Indonesia*. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2001.
- Ishom, Faizul. (2015). *Konsumsi Daging Sapi Orang Indonesia Masih Rendah*. Diambil kembali dari <http://www.antarane.ws.com/berita/527724/konsumsi-daging-sapi-orang-indonesia-masih-rendah>
- Kementerian Pertanian. (2015). *Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan Daging Sapi*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Setjen Kementerian Pertanian.
- Lembong, Thomas Trikasih. (2016). *Mendag Nilai Proses Bisnis Daging Sapi Kurang Efisien*. Diambil kembali dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/18/173511926/mendag.nilai.proses.bisnis.daging.sapi.kurang.efisien>



Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528
e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id



9 772502 868006